

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum.

Kemiskinan merupakan masalah yang sulit di atasi dalam pembangunan suatu negara terutama bagi negara berkembang, seperti Indonesia. Kemiskinan memiliki konsep yang fleksibel sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Makna kemiskinan itu juga merupakan keadaan di mana individu atau masyarakat dalam suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti sandang dan pangan (Damanik & Sidauruk, 2020).

Kemiskinan selalu menjadi masalah di dalam perekonomian. Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya taraf hidup penduduk sehingga kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari menjadi terbatas. Tidak sedikit penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, dan tidak sedikit pula penduduk hidup di bawah pendapatan yang rendah. Banyak program-program bantuan pemerintah yang telah dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi kurang tepatnya bantuan yang diberikan sehingga menjadi penghalang dalam mengurangi angka kemiskinan. Banyak sekali penyebab yang dapat menimbulkan kemiskinan, seperti kondisi geografis yang mempengaruhinya, faktor kultural masyarakat setempat dan berbagai masalah lainnya. Di sisi lain timbulnya kemiskinan sebagai akibat pertambahan jumlah

penduduk sehingga menimbulkan penduduk miskin baru (Ritonga & Wulantika, 2020).

2.1.1.2 Klasifikasi Kemiskinan

Menurut Wahyu (2009) kemiskinan dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa tolak ukur, yaitu:

1. Kemiskinan Relatif, kondisi miskin yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum kemiskinan relatif disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu, dengan fokus pada golongan penduduk termiskin (misalnya 20-40 persen lapisan terendah dari total penduduk berdasarkan pendapatan). Ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan masyarakat. Garis kemiskinan relatif berguna untuk mengidentifikasi penduduk miskin dalam suatu negara, namun tidak dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.
2. Kemiskinan Absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan minimum ini diterjemahkan dalam bentuk nilai uang yang disebut garis kemiskinan. Penduduk dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan absolut bersifat tetap dalam hal standar hidup dan

dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan secara umum antar wilayah dan waktu.

Menurut Sastraadmadja (dalam Damanik & Sidauruk 2020) bahwa berdasarkan pola waktu, kemiskinan dibedakan menjadi empat, antara lain:

- a) *Persistent Poverty*, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun temurun,
- b) *Cyclical Poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan,
- c) *Seasonal Poverty*, yaitu kemiskinan musiman yang sering dijumpai pada kasus nelayan dan pertanian, dan
- d) *Accident Poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

Menurut Mudrajad Kuncoro 1997 (dalam Suleman 2021) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan. Ketiga kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal.

2.1.1.3 Ukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, BPS Indonesia (2025) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non- Makanan (GKNM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Menurut siaran pers BPS Indonesia (2025) Bank Dunia melalui *Macro Poverty Outlook* menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa. Meskipun terdapat perbedaan angka yang cukup signifikan, hal ini wajar karena disebabkan oleh perbedaan standar garis kemiskinan dan tujuan pengukuran yang berbeda. Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: *international poverty line* untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US\$ 2,15 per kapita per hari), US\$3,65 per kapita per

hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (*lower-middle income*), dan US\$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle income*). Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US\$ PPP atau *purchasing power parity*, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US\$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03. BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau *Cost of Basic Needs* (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat.

2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.1.2.1 Pengertian IPM

Indikator Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas fisik dan non-fisik penduduk. Kualitas fisik ditunjukkan oleh angka harapan hidup, sedangkan kualitas non-fisik atau intelektualitas, ditunjukkan oleh angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Indeks juga melihat kemampuan ekonomi masyarakat yang ditunjukkan oleh nilai *procashng power parity* (ppp) indeks. Bertambahnya jumlah penduduk akan menentukan seberapa cepat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, serta sarana prasarana, atau infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Purnama, 2017).

Selain menjadi penggerak, manusia juga menjadi objek pembangunan. Dengan menggunakan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan negara sebagai maju, berkembang, atau terbelakang. Selain itu, ukuran pembangunan manusia ini juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja kebijakan perekonomian yang dibuat oleh pemerintah untuk menjaga kualitas sumber daya manusia (Arofah & Sishadiyati, 2022). Harus ada kebijakan selama proses pembangunan manusia, baik intern maupun ekstern, dan jika diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia, maka akan berdampak positif pada proses pembangunan. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia adalah indeks pembangunan manusia, yang merupakan alat ukur untuk memenuhi dalam pencapaian pembangunan berbasis komponen dasar kualitas hidup. Baik dari

perspektif fisik maupun non-fisik, berdampak pada Kesehatan dan kesejahteraan manusia (Imelda et al., 2021).

Dimensi yang akan dituju dalam pembangunan menjelaskan urutan tahapan perkembangan pengukuran ekonomi pembangunan. Ini dimulai dengan awal munculnya teori ekonomi pembangunan yang mengukur pembangunan berdasarkan tingkat *output* melalui Produk Domestik Bruto (PDB) dengan menggunakan IPM, menangani kemiskinan dengan cara berpikir tentang *entitlement* dan kapabilitas, kebebasan, dan keberlanjutan (Dinata et al., 2020)

2.1.2.2 Komponen IPM

Menurut Badan Pusat Statistik (2022) IPM dapat dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia karena hanya mencakup tiga komponen dasar, yaitu:

1. Indeks Kesehatan, Indeks Kesehatan diperoleh dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup (secara rata-rata). Indikasi ini sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk khususnya dibidang Kesehatan. Semakin tinggi AHH, memberikan indikasi semakin tinggi kualitas fisik penduduk suatu daerah.
2. Indeks pendidikan, Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Harapan lama sekolah dilihat dari jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak yang baru memasuki usia sekolah,

mencerminkan kesempatan pendidikan yang tersedia. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata tahun Pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk usia tertentu, menggambarkan tingkat pencapaian pendidikan saat ini.

3. Indeks pengeluaran, Indeks Pengeluaran merupakan pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata- Rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Perhitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas di mana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan.

2.1.2.3 Metode Perhitungan IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik yang terdiri dari indeks harapan hidup (e_0), indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks pengeluaran, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$$

Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 2. 1 Rumus Perhitungan IPM

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut berkisar antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks

tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran.

2.1.3 Upah Minimum Regional

2.1.3.1 Pengertian UMR

Menurut Boediono (1999) (dalam Kiha, 2021) Upah Minimum Regional adalah upah yang diterima oleh para pekerja dan harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan Upah Minimum tahun 2023 Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman, kebijakan pemerintah pusat dalam menetapkan Upah Minimum sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Upah Minimum berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Kenaikan upah minimum bagi para pekerja akan meningkatkan daya beli mereka yang pada akhirnya akan mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Namun bagi perusahaan yang menganggap upah adalah biaya, maka kenaikan upah akan menyebabkan mereka harus menyesuaikan tingkat upah yang harus mereka berikan kepada para pekerja sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Suharianto, 2025).

2.1.3.2 Faktor Penentu UMR

Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun (2023) menjelaskan tentang pengupahan yang menjadi dasar baru dalam penetapan upah minimum di Indonesia.

Penyesuaian nilai upah minimum dilakukan setiap tahunnya dengan formula penghitungan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu. Formula perhitungan upah minimum yaitu:

$$\mathbf{UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + Nilai\ Penyesuaian\ UM_{(t+1)}}$$

Nilai penyesuaian upah minimum dalam formula penghitungan upah minimum sebagai berikut:

$$\mathbf{Nilai\ Penyesuaian\ UM_{(t+1)} = \{Inflasi + (PE \times \alpha)\} \times UM_{(t)}}$$

Simbol α merupakan variabel yang berada dalam rentang nilai 0,10 sampai dengan 0,30, simbol tersebut ditentukan nilainya oleh dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata atau median upah, selain itu juga dapat dipertimbangkan dari faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Jika nilai penyesuaian upah minimum lebih kecil atau sama dengan 0, upah minimum yang akan ditetapkan sama dengan nilai upah minimum tahun berjalan.

2.1.4 Penanaman Modal Dalam Negeri

2.1.4.1 Pengertian PMDN

Investasi yang bersumber dari dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha. PMDN merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Untuk memudahkan koordinasi penanaman modal di Indonesia dibentuk Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) yang tugasnya melakukan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dalam negeri sesuai peraturan perundang-undangan (S & Soegoto, 2022).

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memiliki peran penting dalam mendorong penciptaan lapangan kerja sektoral dan pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, peningkatan PMDN dapat memperkuat kapasitas suatu provinsi dalam menyerap tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu. Investasi di sektor ini berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilakukan dalam berbagai bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilihan bentuk usaha tersebut ditentukan oleh besarnya modal yang ditanamkan serta tujuan dari investasi tersebut. PMDN, dengan beragam bentuk dan keunggulannya, merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Adrianto et al., 2025).

2.1.4.2 Tujuan PMDN

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 antara lain:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- b. menciptakan lapangan kerja
- c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan

- d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, penyelenggaraan penanaman modal juga didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama tanpa membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Majid Mahmud, 2020).

2.1.5 Jumlah Penduduk

2.1.5.1 Pengertian Penduduk

Menurut BPS Indonesia (2025) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Menurut Todaro & Smith (dalam Aryanti, 2023) Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar sebenarnya adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga dapat menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang akan menguntungkan semua pihak,

menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga akan dapat merangsang meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berarti kemiskinan akan menurun.

Salah satu faktor penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem adalah memperhatikan besarnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk menjadi aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Selain pengangguran, tingginya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar, di mana kuantitas penduduk belum diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (Rahmawati & Sebayang, 2023).

Teori Malthus (dalam Azizah & Asiyah, 2022) menyatakan bahwa sumber daya alam tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan tidak terkendali, sementara ketersediaan sumber daya alam sangat terbatas. Akibatnya, persaingan untuk memenuhi kebutuhan semakin ketat dan mendorong masyarakat semakin dekat dengan garis kemiskinan. Malthus percaya bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak dikendalikan, sumber daya alam pada akhirnya akan habis.

2.1.6 Belanja Modal

2.1.6.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan Pemerintah.

Belanja modal merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besaran alokasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, efisiensi pelaksanaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan prioritas pembangunan daerah. Ketersediaan infrastruktur publik yang dibangun dengan menggunakan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yaitu dengan menyediakan fasilitas yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik (Khikmah et al., 2020).

2.1.6.2 Klasifikasi Belanja Modal

Klasifikasi Belanja Modal menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 yaitu:

1. Belanja Modal Tanah Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan,

pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/ dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan Kegiatan, antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) peralatan dan mesin yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan baik secara kontraktual maupun swakelola sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini, termasuk pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) gedung dan bangunan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan jaringan. Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai/ digunakan meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai termasuk

pengeluaran setelah perolehan (*subsequent expenditure*) jalan, irigasi dan jaringan yang memenuhi persyaratan untuk dikapitalisasi.

5. Belanja Modal Lainnya Pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jaringan (jalan, irigasi, dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini, yaitu: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, buku-buku dan jurnal ilmiah serta barang koleksi perpustakaan sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal lainnya adalah belanja modal non-fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

2.1.6 Kajian Empiris

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dengan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Wafirrotullaela & Bawono, 2023), Pengaruh Upah Minimum Regional dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35	UMR, Tingkat Kemiskinan	Pengangguran	Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.	Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 8, No. 2, 2023 (1254-1266)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kab./Kota di Jawa Tengah Tahun 2021)					
2	(Diyonna Rahmawati & Dr. Asnita Frida Sebayang, 2023), Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan Ekstrem.	Kemiskinan, Jumlah penduduk. IPM, Upah Minimum	PMDN UMR, Belanja Modal	Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan Ekstrem, serta variabel Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Kemiskinan ekstrem.	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis (JRIEB) Volume 3, No. 2, Desember 2023
3	(Lavenia et al., 2023) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, Pengangguran, Jumlah Penduduk Dan Angka Melek Huruf Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2021	Upah minimum, Kemiskinan, Jumlah Penduduk.	PDRB, Pengangguran, angka melek huruf.	PDRB, pengangguran, dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan upah minimum dan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan.	Jurnal Ekonomi Trisakti Vol. 3 No. 1 April 2023
4	(Khairunnisa et al., 2023), Jumlah penduduk, kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Sumatera Selatan tahun 2018-2022.	Jumlah penduduk, Kemiskinan, IPM	Upah Minimum, belanja modal, PMDN, UMR	Jumlah penduduk memberikan pengaruh positif terhadap tingkat pembangunan manusia (IPM), pengangguran memberikan sumbangan yang positif terhadap IPM dan kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan Terhadap (IPM).	Jurnal Ilmiah MEA, Vol.7 No.3, 2023
5	(T. Putri & Hutabarat, 2024) Analisis Pengaruh Pengangguran, Penanaman Modal dalam Negeri, dan Upah Minimum Provinsi terhadap Kemiskinan di Jawa Timur.	Upah Minimum, Kemiskinan, PMDN.	Pengangguran.	Pengangguran memberikan pengaruh positif serta signifikan pada kemiskinan, sedangkan PMDN dan UMP memberikan pengaruh negatif serta signifikan pada kemiskinan.	Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE) e-ISSN: 2540-9247. Volume: 9, Nomor: 1
6	(Khikmah et al., 2020), Pengaruh Kemiskinan,	IPM, Kemiskinan, belanja modal.	Jumlah penduduk, pertumbuhan	Kemiskinan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap IPM, pertumbuhan ekonomi negatif tidak signifikan terhadap IPM,	DINAMIC: Directory Journal of Economic Volume 2 Nomer 4.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja modal Terhadap IPM di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018.		ekonomi, UMR, PMDN	belanja modal positif signifikan terhadap IPM.	
7	(Indiati et al., 2024) Pengaruh Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap IPM Di Kabupaten Jombang.	Kemiskinan, IPM	Pengangguran	Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, pengangguran berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10 (19), 734-743
8	(S & Soegoto, 2022) peran Kemiskinan PMDN dan PMA terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia	PMDN, Kemiskinan	PMA	Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan Angka Kemiskinan, <i>Foreign Direct Investment</i> memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia.	JURISMA: Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen. Volume 12 No. 1 Tahun 2022
9	(Santika et al., 2022), Pengaruh jumlah penduduk, IPM Jumlah Penduduk, Angka Harapan Hidup Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Aceh Tamiang.	Jumlah penduduk, IPM	Angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah,	Secara parsial jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, secara parsial Angka Harapan Hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, secara parsial Rata-Rata Lama Sekolah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.	OPTIMAL:Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol.2, No.4 Desember 2022 e-ISSN: 2962-4010; p-ISSN: 2962-4444, Hal 250-260
10	(Jasasila, 2020), Pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Batang Hari 2011 -2019.	Kemiskinan, jumlah penduduk, IPM		Secara parsial tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap IPM, jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap IPM.	Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 11(1), Mei 2020, 40-44 ISSN 2580-6882 (Online) ISSN 2087-5304 (Print).
11	(Pratama et al., 2022) Pengaruh Tingkat Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2011-2021	PMDN, Tingkat Kemiskinan.		Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan.	Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen Volume 1 No. 2 Juni 2022.
12	(Sari, 2021) Pengaruh Upah	Upah Minimum, Jumlah	Pengangguran	Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap	Equilibrium Volume 10. No. 2. Tahun 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah	Penduduk, Kemiskinan		kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan.	
13	(Nur Azizah & Nur Asiyah, 2022), Pengaruh Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Produk Domestik Regional Bruto, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur.	Jumlah penduduk, IPM, Kemiskinan	PDRB, Pengangguran,	jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.	SIBATIK Journal Volume 1 No.12 (2022)
14	(Putra et al., 2022), Pengaruh Laju Pertumbuhan Penduduk, Gini Ratio dan Pertumbuhan PDRB Per kapita Terhadap Angka Kemiskinan Di Kota Blitar Tahun 2011-2020.	Kemiskinan.	Laju pertumbuhan penduduk, Gini Ratio, PDRB per kapita,.	Laju Pertumbuhan Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Variabel Gini Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Angka Kemiskinan. Variabel Pertumbuhan PDRB Per kapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap angka kemiskinan.	Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 18(2), 2021.
15	(Tahan Upoyo Trisno et al., 2021) Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi sumatera selatan tahun 2016-2020.	Kemiskinan, IPM		Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Fair Value : Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 4, Number 8, 2022.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Hubungan Upah Minimum Regional dengan Tingkat Kemiskinan

Salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap kemiskinan adalah upah minimum, karena tujuan utama ditetapkannya upah minimum yaitu memenuhi

standar hidup minimum seperti untuk kebutuhan pokok, kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Meningkatnya upah minimum dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat. Karena, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat secara pribadi atau keluarga, rakyat harus melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah bekerja (Munarni et al., 2024). Menurut Ningrum (dalam Hanifa, 2021) upah merupakan sumber pemasukan, apabila sumber pemasukan turun ataupun tetap hingga kesejahteraan pula turun ataupun tetap dan itu juga akan mempengaruhi tingkatan kemiskinan. Upah yang diperoleh tampaknya secara riil hasilnya lumayan kecil walaupun secara besaran angkanya lumayan besar.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wafirrotulla & Bawono (2023) menyatakan bahwa pengaruh Upah Minimum Regional terhadap tingkat kemiskinan yaitu negatif signifikan, upah minimum memiliki kedudukan terbalik tentang meningkatnya angka kemiskinan, di mana upah minimum ialah bagian yang tidak terpisahkan dari kemiskinan. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) menyatakan bahwa pengaruh Upah Minimum terhadap kemiskinan yaitu negatif signifikan adanya ketentuan nilai upah minimum ini jumlahnya harus di atas kebutuhan hidup layak masyarakat yang artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak masih berkisar di atas jumlah upah minimum. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Lavenia et al., (2023) menyatakan bahwa Upah Minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dampak dari kenaikan upah minimum dinilai sangat signifikan

karena dapat menaikkan pendapatan setiap masyarakatnya sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dan apabila masih bisa untuk memenuhi kebutuhan non pokoknya.

2.2.2 Hubungan PMDN dengan Tingkat Kemiskinan

. Berlandaskan teori Harrod-Domar, pertumbuhan ekonomi bergantung pada besarnya tingkat tabungan dan investasi. Oleh karena itu, jika terjadi peningkatan tabungan dan investasi, dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan juga akan mengalami tren yang meningkat. Masuknya modal untuk investasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang sejahtera dan penurunan angka kemiskinan. PMDN mempunyai dampak besar terhadap kemiskinan. Dengan adanya realisasi PMDN akan dapat menekan atau menurunkan angka kemiskinan (T. Putri & Hutabarat, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri & Hutabarat (2024) menyatakan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, hubungan negatif tersebut terjadi dikarenakan PMDN dapat meningkatkan produksi yang akan memberikan dampak pada terbukanya lapangan kerja baru serta melakukan penyerapan banyak tenaga kerja. Sejumlah proyek baru akan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat dan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan memberikan dampak pada penurunan tingkat kemiskinan. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Suryanto & Soegoto (2022) menyatakan bahwa pengaruh PMDN terhadap kemiskinan yaitu negatif signifikan, Serupa dengan penelitian yang dilakukan Pratama et al., (2022) terdapat pengaruh signifikan PMDN dengan tingkat

kemiskinan, dengan adanya realisasi PMDN ini akan menekan angka tingkat kemiskinan.

2.2.3 Hubungan IPM dengan Tingkat Kemiskinan

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan parameter untuk mengklasifikasikan negara tersebut negara maju, berkembang, atau terbelakang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia (Aini & Islamy, 2021). Teori pertumbuhan endogen dipelopori oleh Robert E.Lucas dan Paul Romer (dalam Yustie 2017) yang menjelaskan bahwa tingkat *output* tergantung pada sumber daya manusia. Teori ini menekankan pentingnya tabungan dan sumber daya manusia untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. *Output* akan meningkat dalam jangka panjang jika tenaga kerja meningkat. Teori pertumbuhan endogen memberikan peluang terjadinya skala hasil yang semakin meningkat dalam produksi agregat dan memberikan perhatian pada peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian investasi modal, adanya asumsi bahwa investasi publik dan investasi swasta dalam sumber daya manusia menghasilkan peningkatan produktivitas sehingga mampu mengimbangi penurunan skala hasil. Teori ini membuktikan pentingnya sumber daya manusia dalam pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andhykha et al (2018) menyatakan bahwa pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan yaitu negatif signifikan, yang artinya IPM akan menurunkan tingkat kemiskinan, yang menyatakan bahwa adanya peningkatan di bidang pendidikan akan menurunkan

tingkat kemiskinan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Kotambunan et al. (2016) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, Pengaruh tersebut sesuai dengan teori dan signifikan secara statistik. Secara teori apabila indeks pembangunan manusia meningkat kemiskinan akan turun. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Yustie (2017) menyatakan bahwa IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Rahmawati & Sebayang (2023) menyatakan bahwa IPM berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan, berkurangnya tingkat kemiskinan karena Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat mengindikasikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia dapat meningkatkan produktivitas kerja manusia, yang akan meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak

2.2.4 Hubungan Jumlah Penduduk dengan IPM

Persoalan kependudukan bukan hanya berkaitan dengan jumlah penduduk semata, tetapi juga berdampak luas pada proses pembangunan dan kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal kemajuan pembangunan, pandangan terhadap peran masyarakat terbagi menjadi dua kelompok: kelompok pertama memandang penduduk sebagai penghambat kemajuan, sedangkan kelompok kedua menganggapnya sebagai pendorong pembangunan. Peran penduduk sebagai motor pembangunan terwujud karena besarnya jumlah populasi yang menciptakan potensi pasar yang luas serta permintaan yang beragam terhadap berbagai produk dan layanan. Hal ini mendorong kegiatan ekonomi yang bervariasi dan menciptakan efisiensi produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi,

serta menyediakan lapangan kerja dengan upah yang terjangkau dan memadai (Khairunnisa et al., 2023).

Todaro (2011) (dalam Santika et al. 2022) penduduk berfungsi sebagai pendorong pembangunan karena jumlah populasi yang besar pada dasarnya merupakan pasar potensial yang menjadi sumber kebutuhan terhadap berbagai jenis aktivitas ekonomi, sehingga dapat menciptakan efisiensi skala dalam produksi yang akan memberikan keuntungan bagi semua pihak, mengurangi ongkos produksi, dan menyediakan suplai tenaga kerja yang terjangkau dalam jumlah yang cukup, akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa et al. (2023) menemukan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Jasasila (2020) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, bahwa dalam proses produksi perusahaan pasti akan memerlukan tenaga kerja untuk memproduksi sebuah *output*. Ketika perusahaan ingin meningkatkan *output* produksinya maka akan menambah tenaga kerja untuk produksinya sehingga akan banyak membutuhkan tenaga kerja. Dengan demikian maka pertumbuhan penduduk akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia jika itu dapat direalisasikan dengan baik oleh pemerintah. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Simarmata & Iskandar (2022) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Zakaria (2018) menyatakan bahwa pengaruh jumlah penduduk positif signifikan terhadap IPM, hal tersebut dikarenakan ketika jumlah

penduduk meningkat maka kebutuhan masyarakat akan meningkat, konsumsi masyarakat akan meningkat dan lapangan kerja akan meningkat pula.

2.2.5 Hubungan Belanja Modal dengan IPM

Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia. Pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Lebih dalam dijelaskan makna pembangunan manusia sebagai kondisi dan tingkat kemajuan kehidupan manusia yang diukur dari kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya indeks pembangunan manusia (IPM), salah satunya adalah belanja modal dan jumlah penduduk miskin. Keterkaitan antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan (Umiyati et al., 2017).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woyanti (2021) menyatakan bahwa pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia yaitu positif signifikan, adanya peningkatan belanja modal akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Sulistio (2011) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, keterkaitan antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat di mana kebijakan yang dilakukan oleh

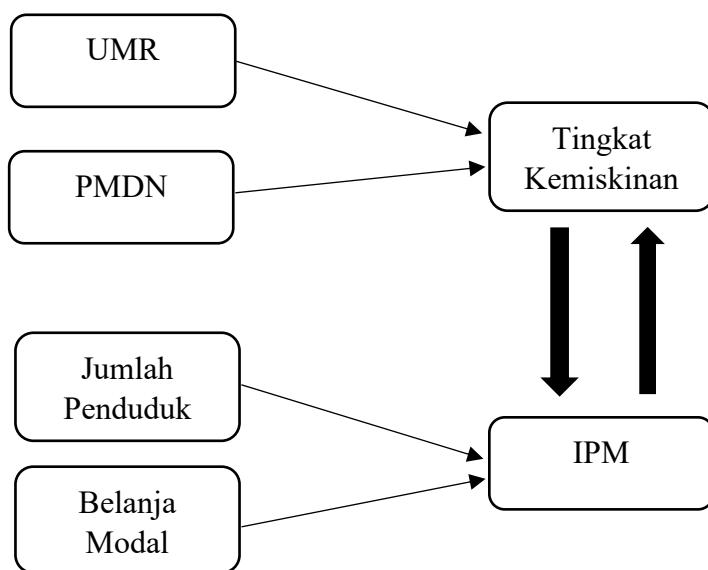
pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Umiyati et al. (2017) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Ariza (2012) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, menunjukkan bahwa pemerintah merealisasikan belanja modal untuk kebutuhan barang publik seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.2.6 Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan IPM

Faktor penyebab kemiskinan berdasarkan teori Lingkaran Setan kemiskinan yaitu, pertama secara makro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produksinya rendah, yang pada gilirannya upah menjadi rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal (Lindrianti, 2024).

Menurut penelitian yang dilakukan Tahan Upoyo Trisno et al. (2021) menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, hal ini dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Indiati et al. (2024) menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan dengan IPM yaitu negatif signifikan, kemiskinan dapat merubah pola hidup masyarakat, masyarakat miskin akan lebih mementingkan kebutuhan primer seperti makanan dan minuman dibandingkan kebutuhan untuk memenuhi taraf pendidikan dan kesehatannya.



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Tingkat Kemiskinan dan IPM di wilayah *Hinterland* IKN. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Diduga secara parsial variabel IPM, PMDN, dan UMR berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

2. Diduga secara parsial variabel tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, sedangkan belanja modal dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.
3. Diduga secara bersama-sama variabel IPM, PMDN, dan UMR berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
4. Diduga secara bersama-sama variabel tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, dan belanja modal berpengaruh terhadap IPM